



*Empowered lives.
Resilient nations.*



KONVERGENSI AGENDA PEMBANGUNAN : Nawa Cita, RPJMN, and 'SDGs'

**NOPEMBER
2015**

KONVERGENSI AGENDA PEMBANGUNAN Nawa Cita, RPJMN, dan 'SDGs'

UNDP INDONESIA COUNTRY OFFICE *

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	1
2	Peta Konvergensi	1
3	Integrasi Agenda	3
3.1	Kesenjangan	4
3.2	Energi	5
3.3	Anti-Korupsi	6
3.4	Kemitraan Global	6
4	Kesimpulan	7
5	Lampiran	8

*Gedung Menara Thamrin 8th Floor Jl. MH Thamrin Kav. 3. Jakarta 10250. Phone: +62-21-3141308, Fax: +62-21-39838941. Contact: Harry Seldadyo [harry.gunardi@undp.org] 3 Nopember 2015.

1 PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia yang ketujuh. Presiden Joko Widodo mengusung agenda pembangunan nasional 'Nawa Cita' yang terdiri dari sembilan prioritas pembangunan. Nawa Cita kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diluncurkan pada 8 Januari 2015. Dokumen RPJMN ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, dan Agenda Pembangunan Wilayah. Nawa Cita secara eksplisit dituangkan dalam bab enam dari bagian pertama RPJMN.

Hampir setahun kemudian, pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam *"Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development"* tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

SDGs yang sekarang ini perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan bahkan daerah. Dalam kasus Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana konvergensi Nawa Cita, RPJMN dan SDGs terjadi dan bagaimana tujuan global yang baru dapat mendukung pembangunan nasional Indonesia. Tulisan ini menganalisis apakah konvergensi ini memang ada. Makalah ini berusaha untuk meninjau sejauh mana SDGs telah tercermin dalam agenda pembangunan nasional dan mengidentifikasi peluang untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya bila diperlukan. Hal itu dilakukan secara lebih rinci dalam empat bidang yang merupakan fokus utama UNDP dan Pemerintah Indonesia, yaitu kesenjangan, lingkungan dan energi, tata kelola dan kemitraan global. Agar tidak bersifat teknis, makalah ini tidak meninjau agenda global dan nasional pada tingkat indikator melainkan pada tingkat tujuan.¹

2 PETA KONVERGENSI

Nawa Cita dan SDGs berasal dari perspektif yang berbeda. Nawa Cita dimulai dari visi Presiden tentang kedaulatan bangsa di arena politik, ekonomi, dan budaya, yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah: (1) ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara, (2) kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta (3) intoleransi dan krisis karakter nasional. Sementara itu, SDGs

¹ Indonesia sebenarnya juga memiliki dokumen rencana pembangunan lain, yaitu RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang mencakup kurun waktu 25 tahun (2005-2025) yang mungkin lebih paralel dengan SDGs dengan cakupan waktu 15 tahun. Namun demikian, RPJP, hanya berisi pedoman umum arah pembangunan tanpa penjelasan teknis lebih lanjut, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan SDGs.

melihat kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai isu-isu global yang perlu ditangani oleh semua negara dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, Nawa Cita sebagaimana tercermin dalam RPJMN, meliputi sasaran sektoral dan regional (spasial), sedangkan SDGs berpusat pada isu-isu sektoral. Perbedaan juga muncul dalam kategorisasi isu antara agenda global dan nasional. Sebagai contoh, tata kelola pemerintahan yang baik di Nawa Cita dan RPJMN dianggap sebagai sasaran khusus untuk dicapai dan tema keseluruhan untuk diarusutamakan, sementara di SDGs tata kelola pemerintahan yang baik adalah satu tujuan (Tujuan 16) dengan target tertentu untuk dicapai.

Pada dimensi substantif, tidak ada kontradiksi yang signifikan pada agenda pembangunan tersebut. Bab 3.4 RPJMN bahkan siap untuk membawa agenda pembangunan nasional ke konteks global, di mana SDGs disebutkan sebagai acuan.² Namun demikian, perbedaan kecil mungkin terjadi pada dimensi teknis, misalnya target penurunan tingkat kemiskinan, lama sekolah, dan lain-lain. Perbedaan tersebut perlu diidentifikasi sebagai bagian dari persiapan untuk pemantauan kemajuan terhadap indikator.

Meskipun mengandung beberapa perbedaan, konvergensi tinggi tetap ditemukan antara Nawa Cita dengan RPJMN dan SDGs. Nawa Cita utamanya diakomodasi dalam Bab 6 RPJMN, sehingga perbandingan satu-lawan-satu antar-ketiganya bisa dilakukan di sini. Berikut ini adalah tabel sederhana untuk membandingkan tiga hal tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel itu, semua target SDG bersinggungan dengan komponen Nawa Cita. Tujuan-tujuan 1 dan 2 masing-masing tentang kemiskinan dan kelaparan sangat terkait dengan setidaknya empat komponen Nawa Cita —komponen-komponen 3, 5, 6, dan 7. Tujuan 3 tentang pembangunan kesehatan pada dasarnya terhubung dengan hampir semua komponen Nawa Cita. Tujuan-tujuan 4 dan 5 masing-masing tentang pendidikan dan gender juga ditangkap oleh komponen-komponen 3 dan 5-9. Demikian pula tujuan 16 tentang tata kelola yang sejajar dengan setidaknya tiga komponen Nawa Cita —komponen-komponen 1, 4, dan 9. Tujuan 8 dan 9 tentang pertumbuhan inklusif dan pembangunan infrastruktur yang berketahanan tercakup dalam komponen-komponen 3, 6, dan 7 Nawa Cita. Tujuan 12 tentang produksi dan konsumsi yang berkelanjutan hanya berhubungan dengan satu komponen Nawa Cita, yaitu Nawa Cita 7.

Jelas terdapat konvergensi antara Nawa Cita dengan RPJMN dan SDGs. Pertanyaannya sekarang adalah apakah arti konvergensi ini? Pertama, jelas bahwa dalam kasus Indonesia, SDGs bukan segugus tujuan asing yang dipaksakan ke dalam agenda pembangunan nasional. Sebaliknya, SDGs sepenuhnya sesuai dengan —dan dalam sejumlah kasus— memperkuat Nawa Cita dan RPJMN. Oleh karena itu, SDGs dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu, dalam pendekatannya yang inklusif, keterlibatan masyarakat internasional, ragam kegiatan teknis yang menopangnya berpotensi membawa banyak hal ke dalam agenda nasional. Ini termasuk perspektif dan pendekatan kebijakan baru, perangkat teknis, serta keterlibatan masyarakat madani, sektor swasta, dan organisasi filantropis —termasuk beragam inovasi. Satu hal penting yang pa-

² Dalam bab tersebut SDGs disebutkan tujuh kali, sementara MDGs empat kali.

Tabel 1. Konvergensi Agenda Pembangunan

Nawa Cita	RPJMN*	SDGs
Nawa Cita 1	Bab 6.1, 10 sub-bab	Tujuan 3, 10, 16, dan 17
N2	B6.2, 5 sub-bab	T16
N3	B6.3, 3 sub-bab	T1-11
N4	B6.4, 6 sub-bab	T14-16
N5	B6.5, 5 sub-bab	T1-6
N6	B6.6, 11 sub-bab	T1-10
N7	B6.7, 9 sub-bab	T1-5, 8, 9, dan 12-15
N8	B6.8, 1 (sub-)bab	T3-4 dan 11
N9	B6.9, 1 (sub-)bab	T5, 10, 16, dan 17

Ket: * Judul bab dalam RPJMN sesuai dengan nama komponen Nawa Cita

tut mendapat perhatian di sini adalah pengintegrasian agenda global dan nasional perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Kedua, konvergensi agenda nasional Indonesia dengan agenda global menawarkan kesempatan bagi negara untuk terlibat secara internasional dan regional, khususnya melalui kerjasama Selatan-Selatan. Tujuan 17 menyediakan *platform* untuk kemitraan global yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi negara-negara serta pemangku kepentingan yang berpartisipasi. Indonesia, sebagai negara yang tengah bertumbuh, secara aktif terlibat dalam Kerjasama Selatan-Selatan melalui sejumlah pertukaran bilateral maupun kerjasama segitiga, misalnya dengan badan-badan PBB dan negara-negara mitra. Situasi pembangunan baru dengan munculnya negara-negara selatan dan keberhasilan pelaksanaan SDGs membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi, dan mendapat manfaat dari, Kerjasama Selatan-Selatan. Hal ini sejalan dengan pesan kunci yang disampaikan oleh Komite Pengarah Kemitraan Global (*Global Partnership Steering Committee*) setelah pertemuan pada tanggal 3-4 September 2015 di Meksiko, mendorong agar anggota *Global Partnership for Effective Development Cooperation* (GPEDC) berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB ke 70 dan KTT PBB untuk mengadopsi Agenda Pembangunan Pasca 2015, yang menyebutkan bahwa kerjasama pembangunan yang efektif harus “berfokus pada hasil” dengan kerangka pemantauan yang “menyediakan pendekatan berbasis bukti sebagai pembelajaran bersama para pemangku kepentingan.”³

3 INTEGRASI AGENDA

Bagian ini menggambarkan empat bidang yang potensial untuk pengintegrasian agenda global dan nasional, yaitu kesenjangan, energi berkelanjutan, anti-korupsi, dan kerjasama Selatan-Selatan.

³ Lihat, bagian II ‘Key Messages’, poin-poin 3 dan 5, <http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Document-8-Key-Messages-for-the-70th-UN-General-Assembly1.pdf>. Dokumen GPEDC juga menyebutkan tiga prinsip lain dari kerjasama pembangunan yang efektif, yaitu kepemilikan negara, kemitraan inklusif, dan transparansi dan akuntabilitas.

3.1 Kesenjangan

Tidak ada dalam MDGs, pengurangan kesenjangan antar dan di dalam suatu negara sekarang merupakan bagian dari agenda global baru dengan SDG 10, yang menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya masalah ini di seluruh dunia. Di Indonesia kesenjangan telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu dan menghambat pembangunan serta berpotensi mengancam stabilitas negara. Koefisien Gini yang merupakan ukuran ketimpangan saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Koefisien saat ini 0,41, lebih tinggi dibandingkan dengan ketika reformasi dan desentralisasi kebijakan politik pertama kali diperkenalkan pada awal Milenium (0,31). Dalam ukuran yang lain, sebagaimana dipublikasikan oleh BPS, 20% penduduk terkaya mengambil lebih dari 48% total persentase pengeluaran rumah tangga, sementara 40% penduduk termiskin hanya 17%. Ini merupakan suatu perubahan signifikan dari posisi pada awal reformasi yang disebutkan di atas, yakni 45% bagi kelompok kaya dan dari 19% bagi kelompok miskin. Lebih jauh lagi, secara spasial tiga pulau paling dinamis —Sumatera, Jawa, dan Bali— mengambil 83% keseluruhan PDRB pada tahun 2014. Ini merupakan peningkatan signifikan dari 80% yang terjadi pada awal Millennium.⁴

Memandang keadaan itu, saat ini RPJMN telah menetapkan sasaran yang agak ambisius dalam pengurangan ketimpangan —misalnya, Indeks Gini hendak diturunkan menjadi 0,36 pada akhir tahun 2019. Pemenuhan sasaran ini —sekaligus juga SDG 10— memerlukan segugus kombinasi kebijakan khusus baik di tingkat pusat maupun di daerah. RPJMN juga secara jelas memberikan pengakuan bahwa Kawasan Timur Indonesia mengalami kesenjangan yang signifikan. Bab 6.3 dari RPJMN —menerjemahkan Nawa Cita 3 tentang pembangunan daerah pinggiran— menyediakan beberapa arahan untuk mengatasi masalah ini. Arahan tersebut termasuk pembentukan landasan untuk desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan utamanya di Kawasan Timur Indonesia, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan afirmatif diharapkan akan dirancang untuk daerah tertinggal, termasuk pula untuk kawasan perbatasan negara, daerah yang terisolasi secara geografis, desa tertinggal, juga daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Sasaran kuantitatif lima tahun juga didefinisikan dalam RPJMN yang dijabarkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah).⁵

Kebijakan pengurangan kemiskinan saja tidak mungkin cukup untuk mengurangi ketimpangan dengan cara yang cukup signifikan dalam memenuhi target penurunan Indeks Gini pada tahun 2019. Hal penting sehubungan dengan pengurangan kesenjangan di Indonesia adalah kombinasi pelbagai langkah penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan redistributif yang spesifik, termasuk perlindungan fiskal dan sosial, yang akan memiliki dampak lebih langsung dan signifikan terha-

4 <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/946> tentang pengeluaran pribadi atau konsumsi dan <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1625> tentang Produk Domestik Regional Bruto.

5 Ada enam kelompok target kuantitatif untuk dicapai selama 2015-2019 (Tabel 5.1. Buku I RPJMN, h.5-6), yaitu target-target dalam (1) agregat makro, (2) pembangunan manusia dan sosial (3) sektor ekonomi strategis, (4) pemerataan pembangunan, (5) pembangunan daerah, serta (6) pembangunan politik, hukum, dan pertahanan.

dap ketimpangan pendapatan. Isu kunci kedua adalah untuk melihat ketimpangan lebih dari sekedar ketimpangan pendapatan dan mengatasi bentuk-bentuk ketimpangan, khususnya yang terkait dengan akses kesehatan, pendidikan atau keadilan.

3.2 Energi

Pada awal masa jabatannya, Presiden Jokowi mengambil keputusan bersejarah untuk mengurangi subsidi energi. Meskipun dalam beberapa hal adalah keputusan yang tidak populer, hal ini memungkinkan Pemerintah pada bulan Mei 2015 untuk merealokasikan Rp 186 triliun ke sembilan sektor —kesehatan, pendidikan, pembangunan pedesaan, kawasan perbatasan, pertanian, perumahan, transportasi, dan infrastruktur daerah.⁶

Pada saat yang sama, pemerintah memberikan penekanan yang kuat pada pembangunan energi, termasuk energi terbarukan. Bab 6.7.3 RPJMN tentang pembangunan energi menyatakan bahwa selain peningkatan produksi dan penyimpanan bahan bakar berbasis fosil, target kuantitatif sedang dipersiapkan untuk perluasan penggunaan biodiesel, bioetanol, dan jenis bioenergi lain. Penekanan baru juga diberikan pada pembangunan pembangkit listrik alami dan bauran energi juga merupakan bagian dari pembangunan energi —menunjukkan komitmen pemerintahan terhadap energi berkelanjutan. Kebijakan baru tersebut, jika diterapkan secara efektif, akan berkontribusi secara nyata pada SDG 7 tentang “Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.”

Tiga sasaran SDG 7 dan dua sarana pelaksanaannya tampak terkait erat dengan rencana pemerintah dalam RPJMN. Untuk akses ke energi (Tujuan 7.1), misalnya, RPJMN telah menetapkan peningkatan rasio elektrifikasi dari 81,5% (2014) menjadi 96,6% (2019); diikuti dengan target untuk meningkatkan konsumsi listrik dari 843 KWh ke 1,200 KWh dalam lima tahun. Juga terdapat target khusus untuk meningkatkan akses masyarakat miskin pada listrik rumah tangga dari 52,3% menjadi 100% dalam periode yang sama. Dalam energi terbarukan, RPJMN telah menetapkan 6-10% untuk energi terbarukan dan instalasi pembangkit listrik terbarukan sebesar 7,5 GW. Pada saat yang sama, terdapat sasaran untuk mengurangi kapasitas pembangkit listrik berbasis fosil menjadi hanya 2,04%. Tindakan kebijakan yang tercantum dalam bab 6.7.3 tentang efisiensi energi secara langsung relevan dengan Tujuan 7.3 dari SDGs.

⁶ Yuri Sato dan Arie Damayanti menulis dalam BIES Vol. 51, No. 2, 2015, hal. 169, “Pada tanggal 1 Januari, Pemerintah mencabut sebagian subsidi BBM dan memperkenalkan kebijakan penyesuaian harga yang lebih berbasis pasar, membuat harga bahan bakar eceran dan komponen inflasi lebih responsif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar. Mekanisme yang berlaku saat ini adalah menghitung harga eceran bahan bakar dengan menambahkan biaya dasar pada biaya-biaya distribusi dan pergudangan, serta menambahkan pajak dan margin. Biaya dasar ditentukan oleh indeks harga minyak (Mean of Platts Singapore) dan kurs nominal antara rupiah dan dolar AS, sehingga biaya dasar akan lebih rendah ketika harga minyak menurun atau ketika rupiah menguat, dan sebaliknya. Pada bulan Januari, misalnya, harga BBM turun dua kali karena harga minyak menurun tajam.”

3.3 Anti-Korupsi

Indonesia (bersama dengan Albania, Rwanda dan Tunisia) adalah salah satu dari empat negara uji coba SDG 16 tentang tata kelola melalui sebuah inisiatif untuk menelaah kesiapan negara dalam menghasilkan dan memanfaatkan data tata kelola serta menilai komplementaritas tujuan tersebut dengan kebijakan nasional dan daerah. Di bawah inisiatif percontohan tersebut, pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional mengidentifikasi indikator yang mengukur kemajuan tata kelola pembangunan. Sebagai negara uji coba SDG 16 dengan pengalaman nasionalnya, Indonesia sudah berada dalam posisi yang tepat untuk berkontribusi di tingkat internasional untuk memajukan SDG 16 terkait tata kelola.

Korupsi adalah salah satu isu utama yang dibahas dalam proyek uji coba SDG 16 dan dalam RPJMN, bab 6.4 yang merangkum arah kebijakan pemerintah tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, anti-korupsi telah menjadi agenda nasional sejak diperkenalkannya reformasi politik di tahun 1999 (UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). RPJMN secara eksplisit mengakui bahwa korupsi merupakan hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. RPJMN menetapkan target untuk mengurangi korupsi melalui Indeks Perilaku Anti-Korupsi (dari 3,6 ke 4,0, skala 0-5) dan Indeks Penegakan Hukum Tipikor (kenaikan 20% pada tahun 2019).

Namun demikian, korupsi, dapat muncul di hampir semua bidang SDGs, membuatnya menjadi isu lintas sektoral —bukan hanya isu SDG16. Penyediaan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kebijakan untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, atau bahkan tindakan untuk menanggulangi kemiskinan tidak steril dari korupsi. Karena dampak negatif korupsi pada bidang-bidang ini, langkah-langkah anti-korupsi perlu diintegrasikan sebagai praktik standar dalam pengelolaan SDGs. Bab 6.4.2 RPJMN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Korupsi PBB.⁷

3.4 Kemitraan Global

SDG 17 adalah tentang kemitraan global. Seperti MDG 8, SDG 17 berkontribusi pada semua tujuan-tujuan lain. Indonesia memberikan perhatian khusus pada kerjasama multilateral seperti PBB, ASEAN, G20, APEC, SSTC, WTO, FEALAC, dan ASEM. Kerjasama multilateral Indonesia bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan global dan regional, berbagi pengalaman dalam demokratisasi, serta resolusi konflik, khususnya melalui partisipasi dalam pemeliharaan perdamaian. Kemitraan global secara eksplisit disebutkan dalam bab 6.1.6 RPJMN. Dalam bab 6.6.1 RPJMN telah menetapkan tujuh sasaran dan enam arah kebijakan yang meliputi kerjasama internasional di bidang pembangunan ekonomi dan perdagangan, serta politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini diperkuat lagi dalam bab 6.1.7 tentang 'Meminimalkan Dampak Globalisasi' dengan dua sasaran dan 12 arah kebijakan, yang meliputi, antara lain, review atau evaluasi pada beberapa kerjasa-

⁷ Konvensi PBB tahun 2003 diratifikasi pada tanggal 18 April 2006, melalui UU No. 7 Tahun 2006.

ma ekonomi yang telah ada. Namun demikian, karena cakupan kerjasama cukup luas, kemitraan global dalam RPJMN tersebut tidak hanya terkait dengan tujuan 17, tetapi juga tujuan 13 (perubahan iklim) dan 16 (tata kelola).

Salah satu fokus utama keterlibatan Indonesia dalam SDGs baik domestik maupun internasional adalah kerjasama Selatan-Selatan dan Segitiga (SSTC). Sejak konferensi Asia-Afrika, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Dalam rangka peringatan 50 tahun konferensi tersebut pemerintah menegaskan kembali pentingnya kerjasama Selatan Selatan dalam beberapa dimensi. RPJMN meliputi pengembangan insentif untuk hubungan Government-to-Government, People-to-People, dan Business-to-Business di bawah SSTC. Pemerintah juga telah terlibat dalam inisiatif Kerjasama Selatan-Selatan (SSC) dengan UNDP serta mitra bilateral.

Meskipun bukan pengganti bantuan asing dari negara-negara Utara, SSTC akan memiliki peran yang semakin penting untuk implementasi SDGs. Berkaitan dengan PBB khususnya, Indonesia mempunyai peluang yang signifikan untuk meningkatkan keterlibatannya di SSTC dalam bidang kemiskinan dan ketimpangan, lingkungan dan energi, serta tata kelola dan anti-korupsi, termasuk bidang-bidang lain untuk kepentingan Indonesia dan negara-negara mitra.

4 KESIMPULAN

Gambaran singkat ini menunjukkan konvergensi terjadi antara Nawa Cita dengan RPJMN dan SDGs dimana tujuan global sebagian besar telah tercermin dalam agenda nasional. Langkah berikutnya adalah memperkuat konvergensi ini dengan mengintegrasikan SDGs secara eksplisit dalam kebijakan nasional untuk perencanaan, penganggaran, dan pengaturan kelembagaan baik di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah mendapatkan pengalaman berharga dalam perencanaan, penganggaran, dan koordinasi untuk MDGs yang dapat diterapkan. Akhirnya, sejalan dengan pendekatan yang sangat inklusif yang diadopsi untuk perumusan agenda pembangunan pasca 2015, langkah penting yang perlu diambil adalah merancang mekanisme partisipatif untuk masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi filantropi untuk menggalang dukungan terhadap SDGs dan prioritas pembangunan nasional.

5 LAMPIRAN

The Detail of Intersections

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
N1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	<p>Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif • Memperkuat sistem pertahanan • Memperkuat jatidiri sebagai negara maritim • Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional • Meminimalisasi dampak globalisasi • Membangun industri pertahanan nasional • Membangun polri yang profesional • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan 	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p> <p>G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan mervitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
N2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.	<p>Bab 6.2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik • Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan • Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) • Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>

(tabel bersambung)

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p>	<p>Bab 6.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris • Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia • Menanggulangi kemiskinan 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p> <p>G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjutan, dan modern bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>
<p>N4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p>	<p>Bab 6.4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Pemberantasan Tindakan Pengebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar • Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba • Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah • Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal 	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>

(tabel bersambung)

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong <i>land reform</i> dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.</p>	<p>Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kependudukan dan keluarga berencana • Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar • Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat • Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak. G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p>

(tabel bersambung)

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p>	<p>Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan • Membangun transportasi umum masal perkotaan • Membangun perumahan dan kawasan permukiman • Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur • Memperkuat investasi • Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan • Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi • Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional • Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional • Meningkatkan daya saing tenaga kerja • Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p> <p>G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjutan, dan modern bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan layak bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p>

(tabel bersambung)

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p>	<p>Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kedaulatan pangan • Membangun ketahanan air • Membangun kedaulatan energi • Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana • Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan • Menguatkan sektor keuangan • Menguatkan kapasitas fiskal negara 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua. G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. G12 Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>
<p>N8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.</p>	<p>Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa</p>	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>

(tabel bersambung)

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.</p>	<p>Bab 6.9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</p>	<p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak. G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>



UNDP INDONESIA

Menara Thamrin, 8-9th Floor Jl. MH Thamrin Kav. 3,
Jakarta 10250.

Phone: +62-21-29802300.

Fax: +62-21-39838941